

HANJUANG

Edisi Pertama | Februari 2018

**UPDATE
PERKEMBANGAN
PENERAPAN
SVLK DI BANTEN**

**MARAKNYA PEREDARAN
KAYU DARI LUAR PULAU
KE SENTRA INDUSTRI
KARANGANTU**

**JARINGAN PEMANTAU
INDEPENDEN KEHUTANAN
BANTEN**

**INDEPENDENT FOREST MONITORING FUND
(IFM FUND)**



“Ketika pohon terakhir sudah kita tebang,
ketika sungai terakhir sudah tercemar dan ketika ikan
terakhir sudah kita tangkap, saat itu kita akan sadar
bahwa uang tidak bisa dimakan.”

- Eric Weiner -

REDAKSI**Penanggung Jawab :**
Irwan Dani**Pemimpin Redaksi :**
Irwan Dani**Sekretaris :**
Eman Sulaeman**Reporter :**
Irwan Dani
Eman Sulaeman
Muhamad Khotim Ali
Bedi Jubaedi
Asep Himawan**Photographer :**
Muhamad Khotim Ali**Editor :**
Muhamad Khotim Ali**Layouter :**
Muhamad Khotim Ali**PERHIMPUNAN HANJUANG
MAHARDIKA NUSANTARA**Jl. Raya Labuan Km. 03 RT 01/01
No. 2 Kp. Saruni Kel. Saruni Kec. Majasari
Kab. Pandeglang - Banten 42216

Perhimpunan Hanjuang - PHMN



hanjuang_mahardika@yahoo.co.id

Dari Redaksi

Puji tuhan dengan segala kekuasaanya sehingga buletin **Hanjuang** untuk pertama kalinya terbit. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua redaksi yang telah menyelesaikan buletin ini meskipun dengan waktu yang singkat dan sedikit terlambat, namun tetap konsisten menyelesaikan penerbitan buletin ini.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada **Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Nasional** dan juga kepada **Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)** yang telah mendukung terbitnya buletin ini.

Hadirnya buletin ini merupakan sebuah kebanggan bagi kami, karena akhirnya untuk pertama kalinya buletin ini terbit dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, kami menerima semua kritik dan saran dari para pembaca buletin **Hanjuang**, karena kita menyadari masih banyak kekurangan pada buletin ini, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kami agar kedepan buletin **Hanjuang** bisa lebih meningkatkan kualitas semata-mata agar para pembaca menikmati dan mendapatkan informasi terkait kehutanan, lingkungan, dan semua yang kami informasikan di buletin **Hanjuang**.

Pada edisi pertama ini, buletin **Hanjuang** menyajikan **Laporan Utama Update Perkembangan Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) di Provinsi Banten** sejak diberlakukannya kewajiban bagi para pengusaha kayu agar memiliki sertifikat SVLK.

Tidak hanya itu, pada buletin ini juga terdapat rubrik-rubrik menarik yang kami sajikan untuk pembaca buletin **Hanjuang**, dari soal kehutanan dan industri kayu, sampai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di provinsi Banten.

Kami dari tim redaksi mengucapkan;

Selamat Membaca!

DAFTAR ISI

EDISI PERTAMA | FEBRUARI 2018

02

DARI REDAKSI

03

DAFTAR ISI



04

LAPORAN UTAMA

Update Perkembangan SVLK di Provinsi Banten



07

LAPORAN KHUSUS

JPIK Banten Melaksanakan Pelatihan Sekaligus Perekrutan Anggota Baru di Saba Juhut - Pandeglang



08

LAPORAN KHUSUS

Maraknya Peredaran Kayu dari Luar Pulau ke Sentra Industri Pengolahan Kayu di Karangantu



09

WAWANCARA

Mahalnya Biaya Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)



10

KOLOM : PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pengembangan Potensi Madu Hutan Ujung Kulon Sebagai Salah Satu Produk Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Mengurangi Laju Deforestasi

12

DATA PERUSAHAAN PENGELOLA KAYU

Data Peredaran Kayu yang Bersumber dari Hutan Rakyat

UPDATE PERKEMBANGAN PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI PROVINSI BANTEN



Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan jaminan legalitas kayu di Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu perwujudan komitmen bersama untuk mengatasi persoalan penebangan dan peredaran kayu ilegal baik untuk pasar domestik dan pasar ekspor. Lebih lanjut, melalui SVLK diharapkan terjadi perbaikan tata kelola kehutanan yang merupakan akar dari permasalahan di sektor kehutanan. Dengan demikian, kredibilitas SVLK dan pelaksanaannya merupakan kunci untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Semenjak berjalan SVLK dari tahun 2009 para multipihak mencoba

terus mencari format yang ideal sehingga skema tata kelola usaha kayu ini bisa berjalan dengan sempurna di ranah regulasi maupun prakteknya di lapangan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk perbaikan tata kelola hutan adalah dengan membentuk satu sistem untuk menjamin legalitas kayu dan produk kayu dan menjamin pengelolaan hutannya secara lestari, yang dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK dibangun secara multipihak sejak tahun 2002, dan saat ini diatur dalam Permen LHK No. 30 tahun 2016 dan Perdirjen No, 14 tahun 2016. SVLK menjadi salah satu elemen kunci dalam

pelaksanaan FLEGT VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreements) antara Indonesia dan Uni Eropa. Hasil akhir dari perjanjian ini adalah penerapan Lisensi FLEGT, dimana kedua belah pihak dapat memulai skema perdagangan kayu legal untuk mengurangi pembalakan liar dan meningkatkan perdagangan kayu legal.

Selain upaya yang dilakukan di dalam negeri, untuk mengatasi kepastian legalitas kayu dari Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai perjanjian kerjasama dengan negara-negara pasar utama ekspor Indonesia,



perjanjian kerjasama dengan negara-negara pasar utama ekspor Indonesia, diantaranya dengan Uni Eropa, melalui FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement). FLEGT merupakan kebijakan Uni Eropa terhadap masalah pembalakan liar dan perdagangan ilegal produk hasil hutan yang terjadi secara global. Indonesia telah meratifikasi FLEGT-VPA dengan Perpres 21 tahun 2014.

Penerapan skema tata kelola usaha kayu melalui Siste Verifikasi Lealitas Kayu (SVLK) ini kadang menemukan kendala ketika di terapkan di daerah, kasus ini banyak terjadi di wilayah Provinsi Banten, dimana proses penerapan sistem verifikasi Legalitas kayu (SVLK) ini berjalan lambat bahkan berjalan di tempat. Banyak persoalan – persoalan yang terjadi dari kurangnya persamaan persepsi para pemangku kepentingan terkait tata kelola usaha kayu dan banyak faktor – faktor lainnya sehingga skema Sistem Verifikas Legalitas Kayu terkesan agak lamban, ini di buktikan masih banyaknya para pelaku Industri Primer yang ada di Provinsi Banten yang belum ber SVLK, padahal ditingkat nasional penerapan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah berjalan sejak tahun 2009.

Pada Tahun 2015 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Banten baru membangun Forest Managemen Unit pada hutan rakyat itu terdiri dari 4 (Empat) Kelompok Tani Hutan Rakyat.



Laporan Utama

No	Nama FMU	Ketua	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas/Ha
1.	Persada	Ence Hadi	Luhur Jaya	Cipanas	Lebak	76,25
2.	Wana Anyer Lestari	Ustadz Otong	Sindang Mandi	Anyer	Serang	7,72
3.	Arta Wanasari	Anani Syarif	Pasir Kembang	Pamayaran	Serang	43,59
4.	Lebak Jaya	Sulaeman	Gunung Anten	Cimarga	Lebak	42,22

Sumber : Dinas KLHK Provinsi Banten

Ada 3 (Tiga) kelompok tani yang berhubungan langsung dengan pelaku industri primer untuk perdagangan ekspor yaitu PT. Pundi Indokayu Industri dimana mereka mengambil sumber bahan baku kayu dari hutan rakyat sehingga mereka mewajibkan para mitra suplay kayu untuk mensertifikasi SVLK lahan kayu garapan mereka dan dari pihak perusahaan PT. Pundi Indokayu Industri menfasilitasi dan membiayai proses sertifikasi lahan garapan hutan rakyat yang mereka miliki yaitu ;

No	Nama FMU	Ketua	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas/Ha
1.	Tunas Sejahtera	Madhadi	Siketug	Ciomas	Serang	40,75
2.	Bina Rimba Lestari	Sumarna	Cieruh Wetan	Cikeusik	Pandeglang	19,81
3.	Tunas Jaya	H. Mian	Pasir Kembang	Muncang	Lebak	20,22

Sumber : Dinas KLHK Provinsi Banten

Banyak faktor yang melatar belakangi lambatnya proses penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berada di provinsi Banten dari kurang tegasnya sanksi dari regulasi yang dibuat oleh pusat serta berkurangnya kewenangan dinas LHK di daerah seakan akan hanya menunggu bola dari pusat, ini menjadi salah satu faktor lambatnya penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di provinsi Banten.

Dari sekian banyak para pelaku industri primer yang berada di banten sumber bahan bakunya kebanyakan dari hutan hak atau hutan rakyat, dalam regulasi masih bisa menggunakan nota angkut sebagai tanda bukti legalitas kayu serta pasar yang mereka suplai masih di pasar lokal sehingga mereka berpandangan bahwa mereka

tidak memerlukan membuat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada produk kayu yang mereka jual, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam hal membangun kesadaran para pelaku industri primer untuk menerapkan Sistem Verifikasi Legalias Kayu (SVLK).
[end/red]

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Provinsi Banten



JPIK BANTEN MELAKSANAKAN PELATIHAN SEKALIGUS PEREKRUTAN ANGGOTA BARU DI SABA JUHUT PANDEGLANG



Pada tahun 2016 JPIK Banten untuk pertama kalinya menyelenggarakan kegiatan pelatihan sekaligus perekrutan anggota baru yang dilaksanakan di Villa Saba Juhut, Pandeglang – Banten. Acara ini berlangsung selama dua hari dengan jumlah 15 peserta dari masing-masing kabupaten yang ada di provinsi Banten, yaitu Lebak, Pandeglang, Tangerang dan Serang. Peserta terdiri dari berbagai kalangan; mahasiswa, aktivis lingkungan, serta masyarakat.

Sejak diresmikan tahun 2016 pada Pertemuan Nasional pertama yang diadakan di Jakarta, acara pelatihan sekaligus perekrutan anggota

baru ini merupakan pertama kalinya di selenggarakan oleh JPIK Banten, dengan harapan anggota mampu memahami dan menguasai persoalan kehutanan serta masalah-masalah yang timbul akibat tumpang tindihnya regulasi peredaran kayu yang ada di daerah Banten.

Pada pelatihan ini JPIK Banten mengundang narasumber dari pihak pemerintah terkait, dari Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Banten dengan materi Perkembangan SVLK di Banten serta aturan terkait SVLK yang disampaikan oleh Heri S. JPIK Banten juga mengundang narasumber dari JPIK Nasional untuk berbagi

pengalaman dari berbagai bidang, antara lain riset meja, teknik pemantauan dan cara menulis laporan investigasi.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan semua anggota baru yang telah mengikuti pelatihan mampu menguasai materi yang mereka dapatkan dari mengikuti kegiatan ini, agar kedepan ketika melakukan kerja pemantauan mampu menguasai lapangan serta mendapatkan hasil yang diinginkan. [end/red]

MASIH MARAKNYA PEREDARAN KAYU DARI LUAR PULAU KE SENTRA INDUSTRI KARANGANTU SERANG, BANTEN



Hasil Pemantauan beberapa waktu lalu oleh tim dari Jaringan Pemantau Independent Kehutanan (JPIK) Banten di lapangan, tim kami beberapa kali melihat mobil truk Fuso yang membawa kayu dari luar pulau, dibuktikan oleh nomor polisi yang ada di mobil tersebut dan beberapa informasi yang di dapat dari hasil investigasi di lapangan. Dari hasil penggalian sumber informasi dari orang yang kami tanya di lapangan bahwa kayu yang di bawa tersebut bersumber dari hutan rakyat atau hutan hak dengan bukti Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), melihat dari ukuran kayu tersebut berbentuk kayu balen.

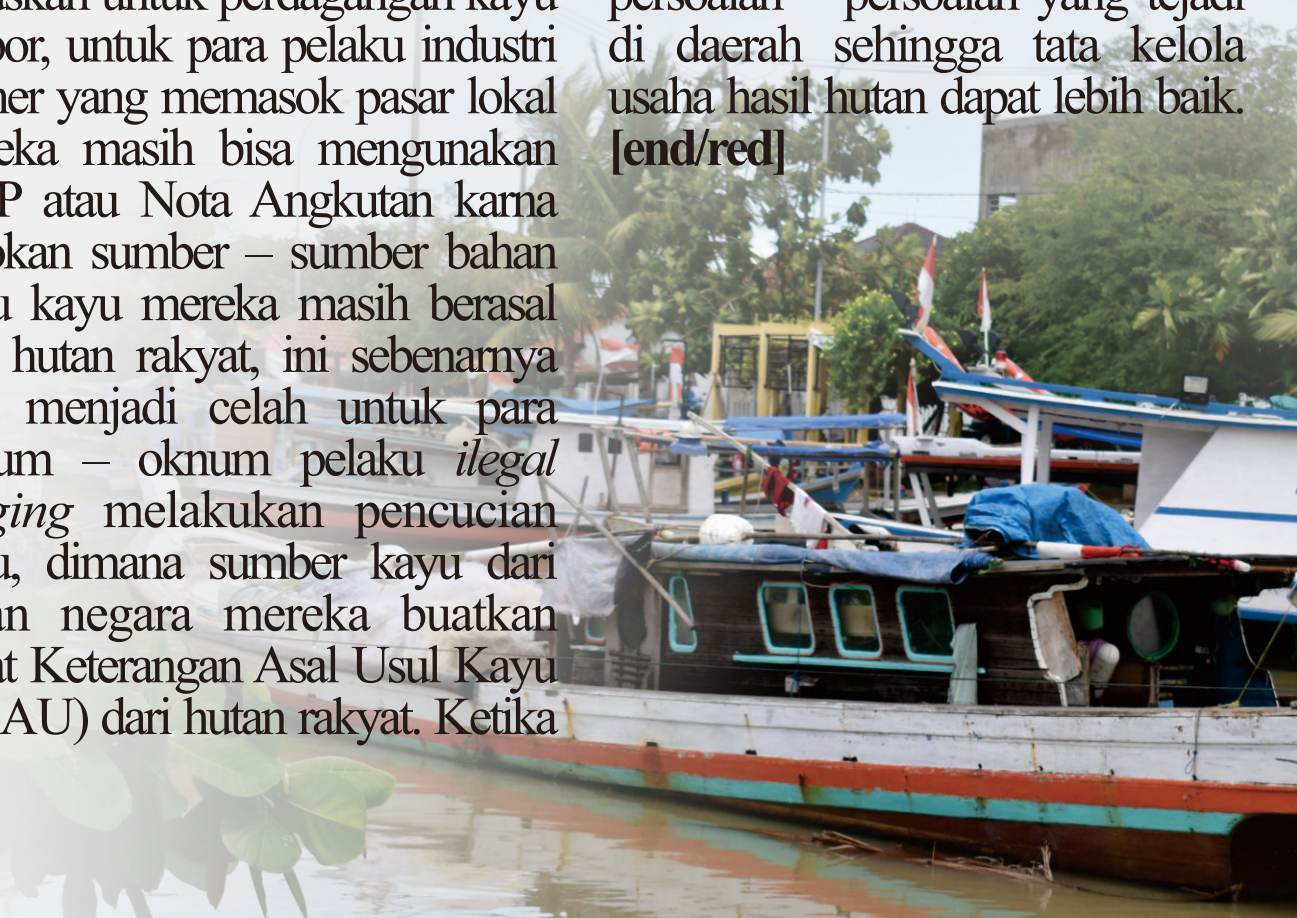
Memang sulit untuk membedakan mana kayu yang bersumber dari hutan rakyat/hutan hak dengan kayu yang bersumber dari hutan Negara ketika kayu tersebut sudah ada di hilir, perlu pemantauan yang lebih ketat di tingkat hulu sehingga dapat meminimalisir praktek – praktek perdagangan

kayu ilegal yang saat ini masih marak terjadi. Terbukti dengan terjadinya penangkapan dengan tertangkap tangannya oknum salah satu pengusaha pengolahan kayu oleh tim penegak hukum Kementrian Lingkungan dan Kehutanan (GAKUM KLHK) di Sentra Pengolahan Kayu Karangantu, Kasemen, Kabupaten Serang.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pun masih lemah dalam hal prakteknya ditingkat lokal karena regulasi ini masih di fokuskan untuk perdagangan kayu ekspor, untuk para pelaku industri primer yang memasok pasar lokal mereka masih bisa menggunakan DKP atau Nota Angkutan karna pasokan sumber – sumber bahan baku kayu mereka masih berasal dari hutan rakyat, ini sebenarnya bisa menjadi celah untuk para oknum – oknum pelaku *illegal logging* melakukan pencucian kayu, dimana sumber kayu dari hutan negara mereka buatkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dari hutan rakyat. Ketika

kayu sudah berada di hilir maka yang menjadi pegangan adalah Nota Angkutan dan disini kita tidak bisa melacak kayu apakah benar bersumber dari hutan rakyat atau hutan negara, karena jenis kayu yang ada pada hutan negara di luar pulau itu tumbuh juga di hutan rakyat.

Semoga ke depan para pemangku kebijakan khususnya dari Kementrian Lingkungan dan Kehutanan dapat lebih menyempurnakan regulasi sehingga dapat mencari solusi persoalan – persoalan yang terjadi di daerah sehingga tata kelola usaha hasil hutan dapat lebih baik. [end/red]



MAHALNYA BIAYA SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)



Kendati Kebijakan Pemerintah terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di satu sisi dinilai cukup baik, tetap menjadi beban bagi pelaku industri primer di level pengusahaan kecil. Keluhan ini di sampaikan kepada Tim Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Banten ketika melakukan wawancara dengan salah satu pelaku industri primer pengolahan kayu yang berlokasi di Pandeglang – Banten, Andrianto.

Terkait pandangannya terhadap kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Andrianto mengeluh mahalnyanya biaya untuk memiliki sertifikat SVLK. Untuk bisa memiliki sertifikat SVLK, pengusaha kayu harus mengeluarkan biaya dikisaran Rp. 20.000.000, tentu itu bukan nominal yang kecil untuk pengusaha seperti Andrianto.

“Biaya untuk mendapatkan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diperkirakan mencapai kisaran Rp

50 juta, biaya itu bagi pengusaha kecil seperti kami sangat besar. Bagi para pengusaha lain yang menyuplai untu segmen pasar lokal tidak bermasalah karena cukup memakai Nota Angkut, kayu tersebut sudah aman dan di anggap legal, untuk mengurus sertifikat bagi mereka tidak jadi kebutuhan.”

Andrianto juga mengatakan, tidak adanya perbedaan harga untuk kayu yang sudah bersertifikat SVLK dan juga kayu yang belum memiliki sertifikat SVLK, sedangkan biaya untuk memiliki sertifikat SVLK tidaklah murah. Jadi untuk pengusaha kecil seperti Andrianto memiliki sertifikat SVLK tidak terlalu berpengaruh terhadap omset perusahaanya.

“Tidak ada perbedaan bagi kami kayu yang bersertifikat maupun tidak, karena harga masih tetap sama. Kami tidak tau, mungkin pabrik besar yang kami suplai medapat peningkatan harga ketika kayu itu dijual ekspor, tapi bagi kami harga kayu setengah jadi yang kami suplai ke mereka tidak ada prubahan harga.”

Persoalan yang di alami para pelaku industri primer di level Industri Kecil Menengah (IKM) cukup besar, alasan mereka cukup rasional memandang apa yang sedang dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait penataan tata kelola usaha hasil hutan terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), harus dicarikan terus formulasi yang tepat dan adil agar sistem ini bisa di terima oleh para pihak yang berkepentingan dengan tata kelola usaha hasil hutan ini.

“Jadi kami harap peran pemeritah untuk mencari solusi yang terbaik akan persoalan yang kami hadapi sebagai pengusaha kecil. harus ada regualasi yang memihak kepada kami sebagai pengusaha kecil, terutama soal biaya untuk pembuatan SVLK.” Tegas Andrianto. [end/red]

PENGEMBANGAN POTENSI MADU HUTAN UJUNG KULON SEBAGAI SALAH SATU PRODUK HHBK UNTUK MENGURANGI LAJU DEFORESTASI



Selama ini pemanfaatan hutan sebagian besar masih pada orientasi produk kayu. Padahal produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat dikawasan hutan Nusantara ini sangatlah melimpah, setidaknya terdapat 557 jenis produk HHBK baik nabati maupun hewani, yang diidentifikasi oleh Pemerintah dalam Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

Fenomena bencana alam yang sering kali terjadi di negeri kita ini, merupakan “jawaban” dari alam atas apa yang telah kita lakukan dalam hal pengrusakan, penghilangan, Kawasan hutan. Banyak pihak menyatakan bencana alam

disebabkan pula oleh perubahan iklim, tetapi perubahan iklim pun memiliki penyebabnya, yang sebagian besar dikarenakan ulah manusia tidak bijak untuk mengelola alam. Laju deforestasi di Indonesia mulai nampak semenjak tahun 1980-an, yaitu saat puncak orientasi pembangunan Orde Baru yang menekankan pada “pertumbuhan” dengan konsep “*trickle down effect*”, dimana roda pembangunan bergantung pada utang dan investasi perusahaan raksasa. Dari orientasi pembangunan seperti itu, banyak hutan yang beralih fungsi menjadi pertambangan serta perkebunan.

Hari ini kita banyak diberikan informasi tidak adil, bahwasannya yang menjadi

penyebab kerusakan hutan, bencana alam, adalah masyarakat sekitar hutan. Sepertinya merekalah aktor utama sebagai perambah, pembakar lahan dan sebayanya. Pun penegakan hukum lebih banyak menyentuh pada pihak ini. Memang, masyarakat sekitar Kawasan hutan butuh sandang, pangan, papan, dan sumber daya hutan menjadi bagian dari kekayaan yang paling memungkinkan bagi mereka untuk dapat memenuhinya. Jangan lupa, bahwa masyarakat sekitar hutan pun menjadi korban paling pertama saat terjadi dampak deforestasi.



Pemikiran diatas, mendorong Koperasi Hanjuang untuk membangun serta memperkuat pertahanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar Kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), melalui pemanfaatan madu hutan. “Odeng” atau Apis Dorsata merupakan jenis lebah madu yang paling produktif menghasilkan madu diantara jenis lebah madu lainnya.

Masyarakat sekitar Kawasan TNUK sudah secara turun temurun memanfaatkan madu hutan sebagai pendapatan alternative dikala tidak menggarap sawah. Sebagian besar masyarakat Ujung Kulon bekerja sebagai petani pada sawah tadah hujan, saat musim kemarau bunga-bunga dari pepohonan hutan bermekaran dan saat itulah madu hutan dapat dipanen. Awalnya petani Ujung Kulon melakukan panen dengan cara pangkas habis seluruh bagian sarang lebah dan mengeluarkan madu dengan cara diperas tangan. Hal ini menyebabkan trend produksi madu hutan terus turun karena larva lebah ikut dipanen, kualitas madu juga

tidak higienis. Mulai tahun 2007 Perhimpunan Hanjuang (P H M N) m e l a k u k a n assessment dan pelatihan teknik panen lestari-pasca panen higienis madu hutan pada petani di Kp. Cikawung girang, Desa Ujung Jaya, Kec. Sumur-

Pandeglang. Pendidikan dan pengorganisasian petani madu terus dilakukan hingga terbentuk wadah Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (K T M H U K), saat ini keanggotaan KTMHUK telah mencakup 4 Desa (Ujung Jaya, Taman jaya, Cigorondong dan Tunggal Jaya) dengan jumlah anggota 153 orang petani madu hutan.

Pada tahun 2012 dibentuklah Koperasi Hanjuang, dimana menjadi wadah untuk petani m a d u d a n a n g g o t a Perhimpunan Hanjuang dalam membangun kemandirian, serta meningkatkan kesejahteraan m a s y a r a k a t m e l a l u i pemanfaatan madu hutan. Semenjak didirikan, Koperasi Hanjuang memulainya dengan menjalankan usaha madu hutan dalam bentuk curah (raw

honey) dipasarkan kepada beberapa mitra di Jakarta hingga Selangor, Malaysia. Mulai tahun 2016 hingga saat ini Koperasi Hanjuang berhasil menembus pasar nasional melalui kerjasama pemasaran dengan PT. Orindo Alam Ayu (Oriflame Indonesia).

Potensi hasil madu hutan di Ujung Kulon dalam 1 musim sekitar 10 s/d 20 ton, pada musim tahun 2017 ini Koperasi Hanjuang menyerap 7.5 ton dengan HPP Rp. 80.000/Kg total nilai pendapatan petani madu anggota Koperasi Hanjuang di Ujung Kulon Rp. 600.000.000, yang mereka dapatkan dalam kurun waktu 3 bulan. Pendapatan ini belum ditambah dengan SHU dari penjualan produk jadi yang dipasarkan oleh Koperasi.

Kami sadar bahwa saat ini Koperasi Hanjuang belum mumpuni dalam hal SDM baik pengurus maupun anggotanya, tetapi semangat untuk terus menerus mengembangkan visi “Meningkatkan kesejahteraan bersama berbasis ekologi berkelanjutan” terus kami upayakan, yang tidak lain untuk kepentingan; kesejahteraan masyarakat yang juga mendukung kelestarian lingkungan hidup. [end/red]



DATA PEREDARAN KAYU YANG BERSUMBER DARI HUTAN RAKYAT

Sampai dengan tahun 2015, jumlah perusahaan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/Industri Pengolahan Kayu Terpadu/Lanjutan (IPKT/IPKL) dan Perusahaan Penampungan yang terdaftar di propinsi Banten sebanyak 186 perusahaan yang tersebar di wilayah Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak.

No	Wilayah	JUMLAH PERUSAHAAN IPHHK/IPKT/TPT				Jumlah
		Kapasitas Produksi <2000m3/th	Kapasitas Produksi <2000m3/th	Kapasitas Produksi <2000m3/th	TPT	
1	Serang	31	32	1	4	68
2	Pandeglang	30	0	0	0	30
3	Lebak	5	9	0	0	14
4	Tangerang	5	20	3	46	74
Jumlah		71	61	4	50	186

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Pengelolaan Kayu di Provinsi Banten

Dari 186 perusahaan IPHHK yang ada di wilayah Banten yang telah mempunyai Petugas Tenaga Teknis berkualifikasi penguji (GANIS-PHPL) hanya 165, dengan data sebagai berikut :

1. Serang

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA GANIS-PHL	NO SK BP2HP	NO REGISTER	MASA BERLAKU		
					B	T	TH
1.	CV. Aneka Rimba Usaha	Kasirin	128/VI/BPPHP-VII/2/22015	00919-07/PKL/XII/2015	26	2	2018
	CV. Aneka Rimba Usaha	Kasirin	Sk. 323/BPPHP VII/2015	02222-07/PKG-R/XII/2015	17	8	2018
	CV. Aneka Rimba Usaha	Yusuf Koko	Sk 127/VI/BPPHP-VII/2/2015	00920-07/PKL/XII/2015	26	2	2018
2	CV. Bukit Tursina	Moch. Bakri	SK.93/VI/BP2HP VII/2/2013	000410-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
3	CV. Dhiva Karya.	Imron Rosadi	SK.114/VI/BP2HP-VII/2/2012	000274-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015
4	CV. NN Bersaudara	Eddy Setiadi	SK.53/VI/BP2HP-VII/2/2013	000381-07/PKG-R/XII/2013	23	2	2016
5	CV. Ratu Handal	Mukhlis	SK. 527/VI/BPPHP-VII/2/2014	00882-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
6	IPHHK Amran HS	Amrani. S.E	SK.825/VI/BP2HP-VII/2/2013	000090-07/PKG-R/XII/2014	6	2	2017
7	IPHHK Fathuroby	Agus Muto'i	SK.146/VI/BP2HP-VII/2/2012	000278-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015
8	IPHHK H Nurdin	Romli.	SK.824/VI/BP2HP-VII/2/2013	000088-07/PKG-R/XII/2014	6	2	2017
9	IPHHK HM Nasir	Achmad Arfain	SK.144/VI/BP2HP-VII/2/2012	000272-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015

10	IPHHK Lukman Hakim	Okky Firmansyah	SK.145/VI/BP2HP-VII/2/2012	000280-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015
11	IPHHK M. Yunus	Nana Suryana	SK.754/VI/BP2HP-VII/2/2014	000089-07/PKG-R/XII/2014	6	2	2017
12	IPHHK Nurholis	Fuad	SK. 331/BPPHP-VII/2015	00277-07/PKG-R/XII/2015	17	8	2018
13	IPHHK Suardi	Nuryudin	SK.327/BPPHP-VII/2015	00276-07/PKG-R/XII/2015	17	8	2018
14	IUIPHHK Usnadi	Mahmudi	SK.329/BPPHP-VII/2015	00072-07 /PKG-R/XII/2015	17	8	2018
15	IUPHHK H Hamran Abd Rahman.	Hendra Wijaya	SK.18/VI/BP2HP-VII/2/2014	000086-07/PKG-R/XII/2014	6	2	2017
17	PD. Adi Putra	Amier	SK.188/VI/BPPHP-VII/2/2014	00105-07/PKG-R/XII/2014	30	3	2017
18	PD. Adinda Kayu Sejahtera	Abdul Aziz	SK.376/VI/BP2HP-VII/2/2012	000345-07/PKG-R/XII/2012	23	1	2016
19	PD. Anugerah Karya	Misno	Sk 49/VI/BPPHP-VII/2/2013	000369-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
20	PD. Anugrah Karya	Musonip Sholeh	SK. 536/VI/BPPHP-VII/2/2014	00875-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
21	PD. Berkah Sejahtera	Heni Sofia	SK.20/VI/BP2HP-VII/2/2013	000208-07/PKG-R/XII/2013	13	2	2016
22	PD. Cahaya Bone	Muhammad Fadli	SK.69/VI/BP2HP-VII/2/2013	000398-07/PKG-R/XII/2013	23	2	2016
23	PD. Cahaya Bunga	Haslindah	SK.55/VI/BP2HP-VII/2/2013	000383-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
24	PD. Cahaya Mandiri	Ali Udin	SK.21/VI/BP2HP-VII/2/2013	000404-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
25	PD. Falas	Tubagus Lutfi H.	SK.328/BPPHP-VII/2015	03665-07/PKG-R/XII/2015	17	8	2018
26	PD. Harapan Jaya	M. Risal	SK.12/VI/BP2HP-VII/2/2013	000362-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
27	PD. Harapan Keluarga	Atang Syamsuddin	SK.808/VI/BP2HP-VII/2/2013	00095-07/PKG-R/XII/2011	6	2	2017
28	PD. Harapan Mulia	Basri	SK.22/VI/BP2HP-VII/2/2013	000403-07/PKG-R/XII/2013	14	4	2016
29	PD. Harapan Mulya	Nahdah	SK.760/VI/BP2HP-VII/2/2013	000092-07/PKG-R/XII/2013	6	2	2017
30	PD. Hikmah Berkah	Fauzi Azhari	SK. 538/VI/BPPHP-VII/2/2014	00856-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
31	PD. Ikhwanul Muslimin 2	Darmawati .	SK.11/VI/BP2HP-VII/2/2013	000361-07/PKG-R/XII/2013	14	2	2016
32	PD. Indokasuari Indah	Herry Sufianto	SK.120/VI/BPPHP-VII/2/2015	00275-07/PKG-R/XII/2015	26	2	2018
33	PD. Jaya Kalima	Dewi Hastuti	SK.19/VI/BP2HP-VII/2/2013	000360-07/PKG-R/XII/2013	27	1	2016
34	PD. Megatama	Hendra Saputra	SK.48/VI/BP2HP-VII/2/2013	000370-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
35	PD. Mekar Indah	H. Basri	Sk 80/VI/BP2HP-VII/2/2013	000403-07/PKG-R/XIII/2013	14	4	2016
36	PD. Mitra Sejahtera	Yayan Heryana	SK.357/VI/BPPHP-VII/2/2014	000125-07/PKG-R/XII/2014	30	6	2017
37	PD. Nuansa Alam	Yayat Ruhiyat	SK.751/VI/BP2HP-VII/2/2013	000091-07/PKG-R/XII/2013	6	2	2017

38	PD. Putra Putra Banten	Jamroni	SK. 532/VI/BPPHP-VII/2/2014	00861-07/PKG-R/XIII/2014	3	12	2017
39	PD. Restu Bunda	Badar Ghonimi	SK. 533/VI/BPPHP-VII/2/2014	00859-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
40	PD. Royal Abadi	Begi Budi Pradiyanto	SK.114/VI/BP2HP-VII/2/2012	000281-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015
41	PD. Sinar Agung	Hariyanto	SK. 544/VI/BPPHP-VII/2/2014	00857-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
42	PD. Sinar Cibetus	Hidayat.	SK.849/VI/BPPHP-VII/2/2014	000074-07/PKG-R/XII/2014	1	1	2017
43	PD. Sinar Curug Dahu	Taopik Rohim	SK.171/VI/BPPHP-VII/2/2014	000075-07/PKG-R/XIII/2014	9	2	2017
44	PD. Siti Aisah	Mulyadi.	SK.54/VI/BP2HP VII/2/2013	000382-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
45	PD. Supar Jaya Mandiri	Suparman Bani Firdaus	SK.702/VI/BP2HP-VII/2/2013	000073-07/PKG-R/XII/2013	21	12	2016
46	PD. Triwi Jaya	Sofyan Sah	SK. 542/VI/BPPHP-VII/2/2014	00876-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
47	PD. Usaha Baru	H. Abdullah	SK.762/VI/BP2HP-VII/2/2013	000094-07/PKG-R/XII/2013	6	2	2017
48	PD.Karya Mandiri	Herry Sukianto	SK.752/VI/BP2HP-VII/2/2013	00096-07/PKG-R/XII/2013	6	2	2016
49	PT. Dai Han Indah	Sundari	SK.70/VI/BP2HP VII/2/2013	000395-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
50	PT. Hyun Indonesia	Joni	SK. 508/VI/BPPHP-VII/2/2014	00830-07/PKB.R/XII/2014	2	11	2017
	PT. Hyun Indonesia	Joni	SK. 551/VI/BPPHP-VII/2/2014	00880-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
	PT. Hyun Indonesia.	Suherman	SK.159/VI/BP2HP-VII/2/2013	000427-07/PKG-R/XII/2013	14	2	2016
51	PT. Pundi Uniwood Industry	Charles Sinaga	SK.123/VI/BPPHP-VII/2/2015	00212-07/PKB-R/XII/2015	26	2	2018
	PT. Pundi Uniwood Industry	Hery	SK.383/VI/BP2HP-VII/2/2012	000349-07/PKL/XII/2013	14	2	2016
	PT. Pundi Uniwood Industry	Lucia Hamdani	SK.384/VI/BP2HP-VII/2/2012	000350-07/PKL/XII/2012	26	3	2016
52	PT. Rahman abadi Timber	Misno	SK.249/VI/BP2HP-VII/2/2013	000369-07/PKG-R/XII/2013	17	3	2016
53	PT. Sumber Bone Jaya	Samsul Bahri H.	SK.637/VI/BP2HP-VII/2/2013	000031-07/PKG-R/XII/2013	26	8	2016
54	PT. Trimitra Mebelindo.	Herfin	SK.114/VI/BP2HP-VII/2/2012	000273-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015
55	PT. Yooshin Indonesia	Gideon Suharto	SK.77/VI/BP2HP VII-2/2013	000397-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
	PT. Yooshin Indonesia	Muhammad Alimin	SK.178/VI/BPPHP-VII/2/2015	00279-07/PKG-R/XII/2015	5	5	2018
56	PT. Rimbawood Arsilestari	Agus Heryanto	Sk.216/VI/BPPHP-VII/2/2015	00958-07/PKG-R/XIII/2015	17	6	2018

2. Pandeglang

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA GANIS-PHL	NO SK BP2HP	NO REGISTER	MASA BERLAKU		
					B	T	TH
1	PT. Sounder Alinda Putra	Ade Saefudin	SK.268/VI/BP2HP-VII/2/2013	000478-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
2	PD. Yudi Jaya	Ahmad Andi	SK.295/VI/BPPHP-VII/2/2014	000129-07/PKG-R/XII/2014	29	6	2017
3	CV. Bysya	Akhmad Hanafi	SK.178/VI/BP2HP-VII/2/2013	000441-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
4	IUIPHHK Imam Murjoko	Aksan Rudi Wibowo	Sk.217/VI/BPPHP-VII/2/2015	00959-07/PKG-R/XIII/2015	16	6	2018
5	PD. Tiara CiPTa Abadi	Dani Yuliadi Zulfiqor	SK.191/VI/BP2HP-VII/2/2013	000440-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
6	PD. Fajar	Dian Hudori	SK.240/VI/BP2HP-VII/2/2013	000458-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
7	PD. Zarot	Econ Sonhaji	SK.158/VI/BP2HP-VII/2/2013	000430-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
8	PD. Mitra Alam Prima	Eddy Surya	SK.236/VI/BP2HP-VII/2/2013	000459-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
9	PD. Maeva	H. Januri	SK.296/VI/BPPHP-VII/2/2014	000128-07/PKG-R/XII/2014	29	6	2017
10	PD. Rival Abadi	Hari Istichori	SK.234/VI/BP2HP-VII/2/2013	000461-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
11	PD. Dua Putri	lin Santini	SK.615/VI/BP2HP-VII/2/2013	000648-07/PKG-R/XII/2013	1	8	2016
12	PD. Dian Putra	Irvan Maulana Akbar	SK.235/VI/BP2HP-VII/2/2013	000462-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
13	PD. Samudera Putra	Iwan Setiawan	SK.232/VI/BP2HP-VII/2/2013	000464-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
14	UD. Rimba Mulya	Kalvin Nato	SK.170/VI/BP2HP-VII/2/2015	00936-07/PKG-R/XII/2015	16	4	2018
15	PD. Alam Lestari 2	Maulana	SK.237/VI/BP2HP-VII/2/2013	000463-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
16	PD. Maeva	Muhammad Fahmi	SK.509/VI/BPPHP-VII/2/2014	00831-07/PKB.R/XII/2014	2	11	2017
17	PD. Indra Lestari	Sofi Budiyanto	SK.161/VI/BP2HP-VII/2/2013	000428-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
18	PD. Alam Lestari	Supriatman	SK.241/VI/BP2HP-VII/2/2013	000457-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
19	PD. Yadi Putra	Yadi	SK.160/VI/BP2HP-VII/2/2013	000429-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
20	PD. Ar Karya	Yana Mulyana	SK.177/VI/BP2HP-VII/2/2013	000442-07/PKGR-R/XII/2013	26	3	2016
21	PD. Mandalawangi	Yopi Sudiarto	SK.696/VI/BP2HP-VII/2/2013	000054-07/PKG-R/XII/2013	27	10	2016
22	PD. Barokatul Harfi	Zaenudin	SK.242VI/BP2HP-VII/2/2013	000456-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016

3. Lebak

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA GANIS-PHL	NO SK BP2HP	NO REGISTER	MASA BERLAKU		
					B	T	TH
1	CV. Sumber Alam.	Agus Wahyudin	SK.90/VI/BP2HP-VII/2/2014	000015-07/PKG-R/XII/2014	28	1	2017
2	CV. Berdikari Jaya Putra	Amin Nasarudin	SK.206/VI/BP2HP-VII/2/2010	03653/PKG-R/XII-7/2010	21	5	2016
3	IUIPHHK Anda/PD. Agung Mulia	Anda.	SK.93/BPPHP-VII/2/2014	000455-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
4	CV. Galih Pratama	Badrudin.	SK.282/VI/BP2HP-VII/2/2013	000533-07/PKG-R/XII/2013	21	5	2016
5	CV. Jaya Barokah.	Didi Nurhadi	SK.709/VI/BP2HP-VII/2/2013	000050-07/PKG-R/XII/2013	27	10	2016
6	PT. Parako Ekatama	Habibie	Sk. 227/VI/BPPHP-VII/2/2015	00969-07/PKG-R/XII/2015	16	6	2018
7	PD. Sumber Arta Sejahtera	Ika Ibrahim Malik	SK.258/VI/BP2HP-VII/2/2013	000473-07/PKG-R/XII/2013	21	5	2016
8	Mulya Jaya Abadi (iuiphhk Juma	Insan Nugraha	SK.227/VI/BP2HP-VII/2/2012	000127-07/PKG-R/XII/2012	16	4	2015
9	IUIPHHK Nase Sahroni	Nase Sahroni	SK.254/VI/BP2HP-VII/2/2013	000250-07/PKG-R/XII/2013	21	5	2016
10	PT. Nila Batu Pertama	Rusdiyanto	SK.227/VI/BP2HP-VII/2/2013	000454-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
11	PD. Family Jaya	Saprudin	SK.389/VI/BP2HP-VII/2/2013	000623-07/PKG-R/XII/2013	21	5	2016
12	CV. Bangun Bangsa	Suntana	SK.206/VI/BP2HP-VII/2/2010	03701/PKG-R/XII-7/2010	21	5	2016
13	PD. Hijrah Indah Pratama Mandiri	Zainal.	SK.226/VI/BP2HP-VII/2/2013	000453-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016

4. Tangerang

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NAMA GANIS-PHPL	NOMOR SK BP2HP	NOMOR REGISTER	MASA BERLAKU		
					B	T	TH
1	PT. Trisatria Rimba Inti Nusa Persada.	Aan Trisnajaya.	SK.386/VI/BP2HP-VII-2/2013	000352-07/PKG-R/XII/2013	14	1	2016
2	PT. Sunwood Timber Industries	Adi Sopriansyah	SK.525/VI/BP2HP-VII/2/2013	000001-07/PKG-R/XII/2013	7	6	2016
3	PD. Raffi Interior& Exterior	Adi Sopriansyah	SK.85/VI/BPPHP-VII/2/2015	00001-07/PKG-R/XII/2013	7	7	2016
4	PT.Sriwijaya Sukses Sejahtera	Agus Gumanti	Sk.215/VI/BPPHP-VII/2/2015	00957-07/PK8-OG-R/XIII/2015	16	7	2018
5	PT. Kreasi Buana Adhitama	Albert Pangemanan	SK.50/VI/BP2HP-VII/2/2013	000371-07/PKG-R/XII/2013	14	2	2016
6	PT. Araputra Fortuna Perkasa	Ali Mashudi	SK.60/VI/BP2HP-VII/2/2013	000387-07/PKG-R/XII/2013	26	3	2016
7	PT. Sunwood Timber Industries	Alnajid	SK. 540/VI/BPPHP-VII/2/2014	00871-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017

8	PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry	Andreas Hermawan Radhiyanto	SK.844/VI/BP2HP-VII/2/2013	000724-07/PKL/XI/2013	29	12	2016
9	PT. Tamawelindo Hartaconusa	Antony S	SK.362/VI/BP2HP-VII/2/2012	000338-07/PKG-R/XII/2012	14	2	2016
10	PT. Perfekta Nusa	Arif Marwan	SK.831/VI/BP2HP-VII/2/2013	000720-07/PKL/XII/2013	22	12	2016
11	PT. Sumber Graha Sejahtera	Aris Karisna	SK.793/VI/BP2HP-VII/2/2013	000705-07/PKL/XII/2013	12	12	2016
12	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI	Arpandi	SK.539/VI/BP2HP-VII/2/2013	000638-07/PKG-R/XII/2013	6	7	2016
13	PT. Sukses Jaya Perkasa	Avie Kartika	Sk.221/VI/BPPHP-VII/2/2015	00963-07/PKG-R/XIII/2015	16	6	2018
14	PT.Lotus Word Lestari	Budiyanto	SK.231/VI/BP2HP-VII/2/2012	000299-07/PKB-R/XII/2012	24	4	2015
15	PT. Asriwood Megah Pratama	Catherine Tjan	SK.114/VI/BP2HP-VII/2/2012	000282-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015
16	PT. Perfekta Nusa	Darmawan	SK. 829/VI/BP2HP-VII/2/2013	000711-07/PKL/XII/2013	22	12	2016
17	IPHHK Eddy Susanto Tjan	Eddy Susanto Tjan	SK. 529/VI/BPPHP-VII/2/2014	00865-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
18	PT. Kita Maju Bersama	Edi Mardani	SK.387/VI/BP2HP-VII/2/2012	000355-07/PKG-R/XII/2012	11	1	2016
19	PT. Saranamulia Ekaperkasa	Eltje Ten	SK.776/VI/BP2HP-VII/2/2013	000094-07/PKG-R/XII/2013	8	12	2016
20	PT. Alfa Global Inda	Erwin	SK.175/VI/BPPHP-VII/2/2015	00283-07/PKG-R/XII/2015	5	5	2018
21	PT. Perfekta Nusa	Felicia Kasim	SK.836/VI/BP2HP-VII/2/2013	000719-07/PKL/XII/2013	22	12	2016
22	PT. Zenith Pratama Indah	Gusmeri Yondra R. S.Si	SK.387/VI/BP2HP-VII/2/20102	000356-07/PKG-R/XII/2012	11	1	2016
23	PT. Meari Jaya	Gusnaidi	SK.274/VI/BPPHP-VII/2/2014	000805-07/PKG-R/XII/2014	21	4	2017
24	CV. Rimba Raya Makmur	Harsianty Harijadi	SK.180/VI/BPPHP-VII/2/2014	000338-07/PKG-R/XII/2014	23	1	2016
25	PT. Kempasindo Mitra Bersama	Hengky Jaya	SK.10/VI/BP2HP-VII/2/2013	000359-07/PKG-R/XII/2013	11	1	2016
26	PT. Jaya Cemerlang Industry	Heriyanto	SK.177/VI/BPPHP-VII/2/2015	00285-07/PKG-R/XII/2015	5	5	2018
27	PT. Kayu Intan Permata Abadi	Hermawan Santoso	SK.182/VI/BPPHP-VII/2/2015	00938-07/PKG-R/XII/2015	5	5	2018
28	PT. Furnilac Primaguna	Ikrom Mulyadi	SK. 535/VI/BPPHP-VII/2/2014	00870-07/PKG-R/XII/2014	4	3	2017

29	PT. Setia Usaha Pahala	Inah Wati	SK.114/VI/BP2HP-VII/2/2012	000284-07/PKG-R/XII/2012	19	2	2015
30	PT.Sahabat Jaya Sukses Abadi	Irvan Vernadi	SK.832/VI/BP2HP-VII/2/2013	000716-07/PKL/XII/2013	22	12	2016
31	PT. Erasumpindo Sejati	Irwan Susanto	SK.137/VI/BP2HP-VII/2/2013	000420-07/PKG-R/XII/2013	21	2	2016
32	PT. Woodaya Nata Mas	Ismawahidin	SK.818/VI/BP2HP-VII/2/2013	000726-07/PKR-R/XII/2013	19	12	2016
33	PT. Setia Jaya Abadi Utama	Iswahyu Broto Susilo S.Sos	SK.47/VI/BP2HP-VII/2/2013	000372-07/PKG-R/XII/2013	21	2	2016
34	PT. Citraprima Indokencana	Iwan Setiawan	SK.285/VI/BPPHP-VII/2/2014	000477-07/PKG-R/XII/2013	17	3	2016
35	PT. Osaka Unggul Sejahtera	Jaja Sukarja	SK.390/VI/BP2HP-VII/2/2014	000373-07/PKG-R/XII/2014	28	2	2016
36	PT. Rimba Kencana Buminusa	Julia Tjitro	SK.387/VI/BP2HP-VII/2/2013	000354-07/PKG-R/XII/2012	11	1	2016
37	PT. Wiratama Inti Sentosa	Kusyanto	SK.208/VI/BPPHP-VII/2/2014	000079-07/PKG-R/XII/2014	10	3	2017
38	PT. Lingga Karisma Jaya	M Zed Hs	SK.756/VI/BP2HP-VII/2/2013	000665-07/PKG-R/XII/2013	21	11	2016
39	CV. Apik Antik Veneer	M. Zaenal Choshas	Sk. 229/VI/BPPHP-VII/2/2015	0971-07/PKG-R/XIII/2015	17	6	2018
40	PT. Hanaqua Industrial Corpindo	Mahariapi Kimin Tan	SK.368/VI/BP2HP-VII/2/2012	000342-07/PKG-R/XII/2012	11	1	2016
41	PT. Sumber Graha Sejahtera	Maulana. A	SK.316/VI/BPPHP-VII/2/2014	000109-07/PKG-R/XII/2014	19	6	2017
42	CV. Timur Jaya	Mohamad Zulhamsyah T.	SK.42/VI/BP2HP-VII/2/2013	000378-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016
43	PT. Sunwood Timber Industries	Mohammad Ali Akbar	SK. 545/VI/BPPHP-VII/2/2014	00877-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
44	PD. Perfekta	Muhamad Hasan	SK.513/VI/BP2HP-VII/2/2013	000632-07/PKG-R/XII/2013	4	6	2016
45	PT. Sahabat jaya Sukses Abadi	Muhasim	SK.834/VI/BP2HP-VII/2/2013	000718-07/PKL/XII/2013	22	12	2016
46	PT. Quartindo Sejati Furnitama Indonesia	Nasurun	SK.387/VI/BP2HP-VII/2/2012	000357-07/PKG-R/XII/2012	11	1	2016
47	PT. Nandi Kencana Abadi	Obi Dirja	SK.368/VI/BP2HP-VII/2/2012	000341-07/PKG-R/XII/2012	23	11	2016
48	PT. Bintang Karya Partikel	Petrus Sony Sangkoyo	SK.806/VI/BP2HP-VII/2/2013	000713-07/PKL/XII/2013	12	12	2016
49	PT. Rimba Kencanamas Mulia	Prabowo	SK. 546/VI/BPPHP-VII/2/2014	00878-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
50	PT. Kodanarindo	R. Asep Sumarna	SK.174/VI/BPPHP-VII/2/2015	00935/PKG-R/XII-7/2015	5	5	2018
51	PT. Sumber Graha Sejahtera	Romi Novira	SK.340/VI/BP2HP-VII/2/2012	000333-07/PKL/XII/2012	10	10	2015
52	PT. Sarana Manis Perkasa	Rudi Hartono.	SK.231/VI/BP2HP-VII/2/2013	000468-07/PKG-R/XII/2013	10	3	2016
53	PT. Alasindo Prima	Sapan	SK.138/VI/BP2HP-VII/2/2013	000421-07/PKG-R/XII/2013	21	2	2016
54	PT. Yen Gwo Jyi Indonesia	Sien Tjhin	SK.23/VI/BP2HP-VII/2/2013	000359-07/PKG-R/XII/2013	23	1	2016

55	PT. Kalimas Woodworking Industry	Srihadi	SK.368/VI/BP2HP-VII/2/2012	000340-07/PKG-R/XII/2012	11	1	2016
56	PT. Sejin Lestari Furniture	Sularno	SK.79/VI/BP2HP-VII/2/2013	000710-07/PKG-R/XII/2013	19	11	2016
57	CV. Rimba Raya Makmur	Sumarno	SK.525/VI/BPPHP-VII/2/2014	00868-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
58	PT. Interkayu Nusantara	Suprayitno	SK.206/VI/BPPHP-VII/2/2014	000082-07/PKG-R/XII/2014	10	3	2017
59	PT. Straightway Primex	Supriyanto	SK.534/VI/BPPHP-VII/2/2014	00863-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
60	PT. Mauson Indonesia Wood Industry	Suratmin	SK.200/VI/BP2HP-VII/2/2013	000449-07/PKG-R/XII/2013	25	2	2016
61	PT. Keramindo Megah Pertiwi	Suyadi	SK.196/VI/BP2HP-VII/2/2013	000445-07/PKG-R/XII/2013	7	3	2016
62	IUIPHHK Teguh Karjanto	Teguh Karjanto	SK.508/VI/BP2HP-VII/2/2013	000633-07/PKG-R/XII/2013	4	6	2016
63	PT. Bintang Khatulistiwa Plysindo	Tjetjep Atmadja	SK.344/VI/BP2HP-VII/2/2011	000337-07/PKL/XII/2012	22	10	2015
64	PT. Bintang Karya Partikel	Tjetjep Atmadja	SK.344/VI/BP2HP-VII/2/2011	000337-07/PKL/XII/2012	22	10	2015
65	PD. Sinar Agung	Topikin Mugiono	SK.530/VI/BPPHP-VII/2/2014	00864-07/PKG-R/XII/2014	3	12	2017
66	PT. Sari Hijau Mutiara	Usman Achmad Taufiq	SK.46/VI/BP2HP-VII/2/2013	000374-07/PKG-R/XII/2013	14	2	2016
67	PD. Virosa	Victor Susanto	SK.59/VI/BP2HP-VII/2/2013	000388-07/PKG-R/XII/2013	14	2	2016
68	PT. Jati Alam Muara Indah	Warsono	SK.260/VI/BPPHP-VII/2/2014	000040-07/PKG-R/XII/2014	7	4	2017
69	PT. Gunung Meganusa Perkasa	Wawan Halwani	Sk.247/VI/BPPHP-VII/2/2015	00989-07/PKG-R/XII/2015	16	6	2018
70	PT. Citraprima Indokencana	Wong Suwendy	Sk.248/VI/BPPHP-VII/2/2105	00990-07/PKG-R/XII/2015	16	6	2018
71	PT. Kalimas Woodworking Industry	Zurli	SK.759/VI/BP2HP-VII/2/2013	00022-07/PKG-R/XII/2013	21	11	2016
72	PT. Surya Mahkota Timber Industry	Irawan Santoso	SK.385/VI/BP2HP-VII/2/2012	000353-07/PKG-R/XII/2012	23	1	2016
73	PD. Sinar Agung	Kiat Hidayat Iteh	SK.368/VI/BP2HP-VII/2/2012	000339-07/PKG-R/XII/2012	11	1	2016
74	CV. CiPTa Usaha Mandiri	Subagyo	SK.582/VI/BP2HP-VII/2/2013	000651-07/PKG-R/XII/2013	9	7	2016

Bahan Baku yang dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas produksi seluruh Perusahaan Industri Primer hasil hutan yang ada di Propinsi Banten sebesar 1,2 Juta m3 per tahun, dan sekitar 70 % nya bahan baku tersebut berasal dari kayu rakyat, sisanya berasal dari kayu negara dan kayu impor.

NO	WILAYAH	JUMLAH PERUSAHAAN	KAPASITAS PRODUKSI (M3)	KEBUTUHAN BAHAN BAKU (M3/TAHUN)
1	Serang	68	241,070	401,783.3
2	Pandeglang	30	54,600	91,000.0
3	Lebak	14	37,900	63,166.7
4	Tangerang	74	410,900	684,833.3
Jumlah		186	744,470.00	1,240,783.33

■ Tabel 2. Kebutuhan Bahan Kayu Industri Pengolahan Kayu di Provinsi Banten

Pemasaran hasil kayu dari produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/Industri Pengolahan Kayu Terpadu/Lanjutan (IPKT/IPKL) dan Perusahaan Penampungan Terdaftar dalam bentuk kayu gergajian, veneer, plywood, wood working, panel kayu, blocboard, barecore, furniture dan lainnya dipasarkan di dalam negeri dan sebagian di eksport ke mancanegra diantaranya ke negara Asia, Eropa, Amerika dan Arab, dengan perolehan Devisa negara dari tahun 2014-2015 sebesar \$27.574.276,-.

Melihat data yang ada sumber suplai bahan baku kayu industri primer di bawah 6000 M3 yang beroperasi di wilayah propinsi Banten, mayoritas bersumber dari hutan rakyat atau hutan hak, hingga perlu penyempurnaan regulasi terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk di daerah, agar penerapan Tata Kelola Usaha Hutan menjadi lebih baik dan praktek ilegal logging dapat terminimalisir. [end/red]

